

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 9 Tahun 2015.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PP No. 35 Tahun 2023.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023*. Permendagri No. 6 Tahun 2023.

B. Buku

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Anwar, Chairil. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fachrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing, 2007.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba. Empat, 2013.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan. Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks, 2010.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

C. Lain-lain

Boemiya, Helmy. "Teori Kewenangan dan Sumber-sumber Kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat)". Tersedia di: <https://boeyberusahaabar.wordpress.com>. Diakses tanggal 11 November 2023.

Cahyadi, Yadi, Kepala Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, *Wawancara* tanggal 29 November 2023.

Fansuri, Firkan. "Pajak Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Listrik Kini Nol Persen". Tersedia di: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ryfis0468/pajak-kendaraan-bermotor-mobil-dan-motor-listrik-kini-nol-persen-part1>. Diakses tanggal 11 November 2023.

Febriani, Lita. "Pemerintah Hapus PKB dan BBNKB Kendaraan Listrik". Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/otomotif/2023/01/25/pemerintah-hapus-pkb-dan-bbnkb-kendaraan-listrik>. Diakses tanggal 11 November 2023.

Hadjon, Philipus M.. "Tentang Wewenang". *Makalah*. niversitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Insan, Isep H. dan Tisha Nidia Maghijn. "Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2016 Beserta Permasalahannya". *Pakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. "Pemerintah Terus Dorong Penggunaan Mobil Listrik". Tersedia di: <https://dephub.go.id/post/read/pemerintah-terus-dorong-penggunaan-mobil-listrik>. Diakses tanggal 11 November 2023.

Manan, Bagir. "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung 13 Mei 2000.

Redaksi. "Tentang Pasal 23A UUD 1945". Tersedia di: <http://bukabukaanpajak.wordpress.com>. Diakses tanggal 11 November 2023.

Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.